RENCANA KERJA
KECAMATAN TANJUNGANOM
TAHUN 2023

KECAMATAN TANJUNGANOM

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

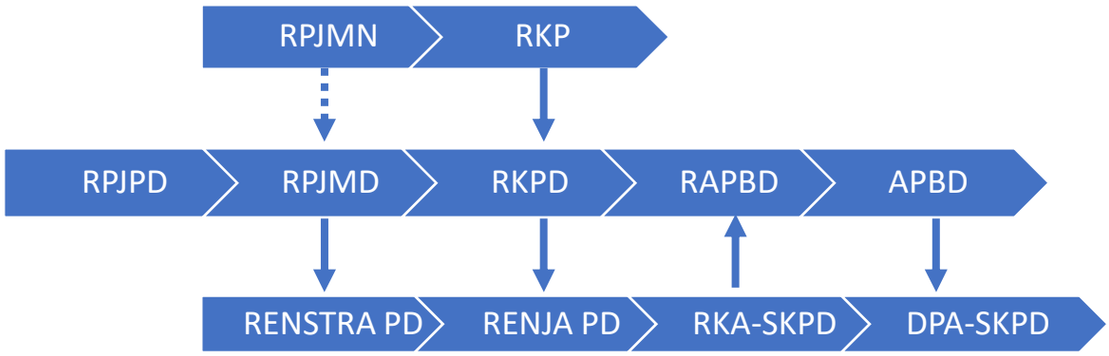
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-5 (ke-lima) periode tahun 2023; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

3.3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					**UNSUR WILAYAH**									
7	**01**				**Kecamatan Tanjunganom**				**5,672,211,200**					
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**			**4,028,982,180**	**2,995,064,340**	**74.34**			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah			**950,000**	**0**	0			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			950,000	0	0			

						Kinerja SKPD								
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD			**3,749,214,600**	**2,821,138,305**	**75.25**			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			3,746,687,000	2,821,138,305	75.30			
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2,527,600	0	0			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**9,600,000**	**0**	**0**			
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2,800,000	9,600,000	0	0			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah			**65,354,350**	**34,585,100**	**52.92**			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediak			3,532,600	1,875,000	53.08			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		13,637,000	26,195,250	17,830,000	69.07			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2,770,950	3,000,000	1,401,600	46.72			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3,600,000	1,800,000	50			

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		15,546,700	1,197,500	0	0			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		14,079,000	24,829,000	11,678,500	47.04			
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		10,950,000	3,000,000	0	0			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**48,210,130**	**1,475,000**	**3.06**			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		50,470,000	11,520,040	0	0			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17,750,000	36,690,090	1,475,000	4.02			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**25,130,000**	**23,697,545**	**94.30**			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		28,000,00	3,150,000	636,000	20.19			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		17,183,883	21,980,000	23,061,545	104.92			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah			**130,523,100**	**114,168,390**	**87.47**			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		29,086,762	35,112,850	37,314,390	106.27			

7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			4,000,000	1,950,000	48.75			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			19,000,000	14,980,000	78.84			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitsi		70,366,000	72,410,250	59,924,000	82.76			
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan**			**107,226,800**	**92,477,500**	**86.24**			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan			**90,900,000**	**89,102,500**	**98.02**			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			90,900,000	89,102,500	98.02			
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			**10,488,400**	**0**	**0**			
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		5,400,000	10,488,400	0	0			

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yan Dilimpahkan kepada Camat			**5,838,400**	**3,375,000**	**57.81**			
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			5,838,400	3,375,000	57.81			
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**			**47,724,900**	**82,533,830**	**172.94**			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**47,724,900**	**82,533,830**	**172.94**			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		1,900,000	31,089,700	1,400,000	4.50			
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		800,000	16,635,200	81,133,830	487.72			
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**			**22,913,400**	**8,230,500**	**35.92**			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			**22,913,400**	**8,230,500**	**35.92**			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara		12,652,800	22,913,400	8,230,500	35.92			

					dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan**			**11,727,600**	**9,868,500**	**43.07**			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**11,727,600**	**9,868,500**	**43.07**			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		5,602,000	11,727,600	9,868,500	43.07			
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**			**32,039,950**	**13,007,000**	**40.60**			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan			**32,039,950**	**13,007,000**	**40.60**			

						Pemerintahan Desa								
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		19,056,000	14,191,100	7,688,000	54.17			
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		5,400,000	17,848,850	5,319,000	29.80			
KELURAHAN TANJUNGANOM														
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**			**127,869,000**	**117,393,839**	**91.81**			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD			**15,100,000**	**23,900,000**	**158.28**			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6,300,000	15,100,000	23,900,000	158.28			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah			**18,354,700**	**12,224,100**	**66.60**			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediak			4,290,000	2,860,000	66.67			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			9,264,700	7,566,100	81.67			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3,000,000	298,000	9.93			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1,800,000	1,500,000	83.33			

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**4,604,300**	**0**	**0**			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4,604,300	0	0			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**82,950,000**	**79,770,139**	**96.17**			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			450,000	0	0			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			10,500,000	7,770,139	74.00			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			72,000,000	72,000,000	100			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah			**6,860,000**	**1,499,600**	**21.86**			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3,545,500	1,499,600	42.30			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			3,314,500	0	0			
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa**			**481,001,200**	**131,501,100**	**27.34**			

					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**yang dilaksanakan**								
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**349,500,100**	**0**	**0**			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		317,892,000	314,515,000	0	0			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		25,726,000	34,985,100	0	0			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**131,501,100**	**131,501,100**	**131,501,100**			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			131,501,100	159,498,600	121.29			
KELURAHAN WARUJAYENG														
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**			**171,432,265**	**140,515,504**	**81.97**			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD			**23,400,000**	**23,400,000**	**100**			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			23,400,000	23,400,000	100			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah			**27,072,600**	**19,749,500**	**72.95**			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang			2,998,800	2,479,000	82.67			

						Disediak								
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			22,073,800	15,620,500	70.76			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2,000,000	1,650,000	82.50			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**5,525,000**	**0**	**0**			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5,525,000	0	0			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**86,600,000**	**78,087,404**	**90.17**			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			14,600,000	6,087,404	41.69			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			72,000,000	72,000,000	100			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah			**28,834,665**	**19,278,600**	**66.86**			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan			4,825,200	258,600	5.36			

					Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14,500,000	9,600,000	66.21			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			9,509,465	9,420,000	99.06			
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**			**641,293,905**	**271,725,000**	**42.37**			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**349,943,905**	**0**	**0**			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			339,295,905	0	0			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		136,000,000	10,648,000	0	0			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**291,350,000**	**271,725,000**	**93.26**			
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			291,350,000	271,725,000	93.26			

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya kesalahan harga terhadap belanja modal dikarenakan masih menggunakn acuan harga lama	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menyesuaikan harga dan tipe barang yang akan dibeli
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya penyesuaian SBU upah edar untuk desa dan kelurahan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Menesuaikan SBU dalam perubahan RKPD 2022
Program	70%	Sedang

Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ada kegiatan yang belum dilaksanakan sampai tribulan II dikarenakan kegiatan tersebut ada di Tribulan III	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Melaksanakan sesuai jadwal kegiatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	73%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ada kegiatan yang belum dilaksanakan sampai tribulan II dikarenakan kegiatan tersebut ada di Tribulan III	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Melaksanakan sesuai jadwal kegiatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ada kegiatan yang belum dilaksanakan sampai tribulan II dikarenakan kegiatan tersebut ada di Tribulan III	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Melaksanakan sesuai jadwal kegiatan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaporan dokumen terakhir diakhir tahun	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Akan dilaporkan dokumen sesuai dengan jadwal

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan II

3.3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta

target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjunganom

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Tanjunganom.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

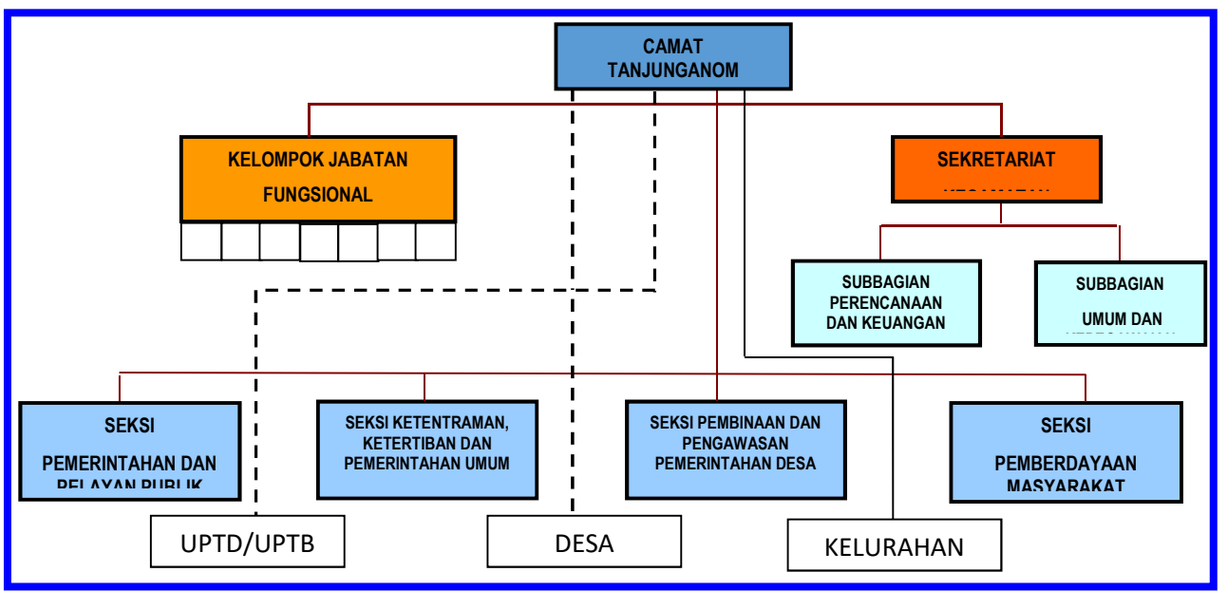
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan TanjunganomKabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Keterangan:

_____ : garis komando

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakanpengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakanpeningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakanperencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakanfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakanpeningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakanpengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakanpemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakanfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umummempunyai tugas :

melaksanakanpembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

a. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
b. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
c. melaksanakankoordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
d. melaksanakanfasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
e. melaksanakanpembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
f. melaksanakanpembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
g. melaksanakanpenanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
i. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
j. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. melaksanakanfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakanfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakanfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakanfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakanfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakanfasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g. melaksanakanfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakanfasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakanfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakanfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakanfasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

g.Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugasmelaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan;
b. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
c. melaksanakanpemeliharaan sarana dan prasarana umum;
d. melaksanakanurusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
e. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakanpemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
d. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
e. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
f. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a. melaksanakanpembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kelurahan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakanpembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
e. melaksanakanpembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
f. melaksanakanpenanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
f. melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
g. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Kecamatan Tanjunganom

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Tanjunganom adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Tanjunganom sebanyak 18 (Delapan belas), yang terisi sebanyak 11 (sebelas) jabatan struktural dan dibantu oleh 17 (Tujuh belas) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjunganom

Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	**Nama**	**Jumlah**
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	9
7.	THL	3
8.	Lurah/KaKel	2
9.	Sekkel	-
10.	Kasi Kel.	2
11.	Staf Kel	8
12.	THL Kel	8
	Jumlah	**39**

Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Tanjunganomsebagai berikut :

Tabel

Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom dan 2 Kelurahan

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	7
3.	Penata	III/c	2
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5.	Penata MudaI	III/a	1
6.	Pengatur Tinkgkat I	II/d	7
7.	Pengatur	II/c	5
8.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
9.	Juru Tingkat I	I/d	1
Jumlah			**28**

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Tanjunganom dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel

Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom dan Kelurahan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	3
2.	S1	8
3.	D3	1
4.	SMA	11
5.	SMP	4
6.	SD	1
JUMLAH		**28**

Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor 1 (satu) bidang;
2. Gedung Pendopo Pertemuan 1
3. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Rumah Dinas 1 unit
5. Gedung PKK 1 Unit
6. Gardu Pos Jaga Sat Pol PP.
7. Musholla
8. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat1 (satu) buah yaitu 1 unit Isuzu Panther Tahun 2013

- Roda dua (dua)Unit yaitu Honda Supra Tahun 2006 dan Yamaha Vixon 2016

9. Peralatan inventarislainnya kantor Kecamatan dan Kelurahan dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

• Meja Kerja	:	20	buah
• Meja layanan	:	3	buah
• Kursi	:	40	buah
• Bangku Panjang	:	4	buah
• Kursi stainlist	:	35	buah
• Kursi plastik	:	50	buah
• Meja kursi tamu	:	2	unit
• Sound sistem	:	1	set
• Televisi	:	1	unit
• Komputer khusus KTP SIAK	:	1	unit
• Komputer e-KTP (depdagri)	:	2	unit
• Laptop	:	4	unit
• Printer	:	7	unit
• Telepon/fax	:	1	unit
• Genset listrik	:	1	unit

2.3.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanjunganom dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

• Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

• Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak

• Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

• Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

2.3.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**	**974**	**1057**	**1079**	**1179**	**1280**	**97,4%**	**97,8%**	**98,09%**	**98,17%**	**98,33%**
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak				88	98	168	177	186	88	98	186	177	183	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100

2.3.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

"**TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, (Perangkat Daerah) memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-2 serta sasaran strategis Kecamatan Tanjunganom

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan

2.3.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan

a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tanjunganom harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
d. TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
g. Income perkapita masyarakat masih rendah.
h. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Tanjunganom

2) Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Tanjunganom dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tanjunganom untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tanjunganom dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tanjunganom;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kertosono, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Tanjunganom;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjunganom. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjunganom. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

2.3.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
5) *Peningkatan* Tata *Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

2.3.3.6. Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 3.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.3.3.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2) Ranwal	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Rankhir	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**4,153,236,527**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**4,148,351,700**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD**	**12 Bulan**	**3,873,013,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD**	**12 Bulan**	**3,873,013,000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,873,013,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang /bulan	3,873,013,000	
7.01.01.2.02.02						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 paket**	**4,800,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**18,504,000**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	13,704,000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	35 Orang	4,800,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35 Orang	4,800,000	

	dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			dan Fungsi		yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**60,435,350**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**65,222,100**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediak	1 Paket	2,429,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediak	1 Paket	3,885,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,271,250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,352,100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,915,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,130,000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,800,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	19,020,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	20,055,000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**55,471,827**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3 jenis**	**30,764,600**	

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Jenis	8,845,950	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1,599,350	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Jenis	46,625,877	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	29,165,250	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**112,788,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**112,008,000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	27,440,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	27,440,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	84,348,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	83,568,000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah**	**98%**	**46,728,350**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah**	**98%**	**48,840,000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98%	31,884,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	32,525,300	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90%	5,800,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,100,000	

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitsi	100%	9,044,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitsi	2 Unit	10,214,700	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**92,450,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan**	**12 bulan**	**151,222,500**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**12 Bulan**	**88,800,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**-**	**0**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 Desa/ Kelurahan	88,800,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	0	
7.01.02.2.02						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**2,300,000**	
7.01.02.2.02.03						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	1 Laporan	2,300,000	

						Wilayah Kecamatan		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yan Dilimpahkan kepada Camat**	**98%**	**3,650,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yan Dilimpahkan kepada Camat**	**98%**	**148,922,500**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	98%	3,650,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	148,922,500	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**25,564,100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**27,517,100**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**98%**	**25,564,100**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**98%**	**27,517,100**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	98%	11,975,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	98%	14,450,000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	98%	13,589,100	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	3 Dokumen	13,067,100	

			Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**5,725,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**6,100,000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Bulan**	**5,725,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Bulan**	**6,100,000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	98%	5,725,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	6,100,000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan**	**12 bulan**	**6,272,500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan**	**12 Bulan**	**10,350,000**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	6,272,500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	10,350,000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan		Jumlah Orang	98%	6,272,500	Pembinaan Wawasan		Jumlah Orang	98%	10,350,000	

	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**12 Bulan**	4,551,800	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**12 Bulan**	**6,400,000**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12 Bulan**	**4,551,800**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12 Bulan**	**6,400,000**	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	98%	1,938,400	Fasilitasi Administrasi Tata		Jumlah Dokumen yang	28 Doku	4,100,000	

	Pemerintahan Desa		dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa		Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	men		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	98%	2,613,400	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28 Dokumen	2,300,000	
KELURAHAN TANJUNGANOM					**449,529,600**					**449,525,400**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kelurahan Tanjunganom	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**96,564,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**254,371,000**	
7.01.01.2.02						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**31,500,000**	
7.01.01.2.02.03						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	31,500,000	
7.01.01.2.05						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Kegaiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**5,180,000**	
7.01.01.2.05.02						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	5,180,000	

								Kelengkapan			
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**13,202,900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**70,434,500**	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	8,402,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,940,500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	3,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3,000,000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	1,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,800,000	
7.01.01.2.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	56,694,000	
7.01.01.2.07						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**51,000,000**	
7.01.01.2.07.06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	51,000,000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**82,050,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 bulan**	**89,778,000**	

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	450,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	450,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	10,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	71,100,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	77,328,000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah**	**98%**	**1,311,100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah**	**98%**	**6,478,500**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	1,311,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1,223,000	
7.01.01.2.09.09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitsi	2 unit	5,255,500	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**352,965,600**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**195,154,400**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**98%**	**218,160,000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**98%**	**29,964,000**	

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100%	218,160,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	29,964,000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**98%**	**134,805,600**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**100%**	**165,190,400**	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	98%	134,805,600	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	98%	165,190,400	
KELURAHAN WARUJAYENG					**690,957,800**					**690,956,900**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**120,670,700**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**250,961,800**	
7.01.01.2.02						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**35,280,000**	
7.01.01.2.02.03						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	35,280,000	
7.01.01.2.05						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Kegaiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**6,852,000**	
7.01.01.2.05.02						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut		Jumlah Paket Pakaian Dinas	1	6,852,000	

						Kelengkapannya		beserta Atribut Kelengkapan	Paket		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**90%**	**22,870,700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	**90%**	**30,921,800**	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	20,870,700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,269,800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	2,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,652,000	
7.01.01.2.07						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**72,500,000**	
7.01.01.2.07.06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	72,500,000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**85,800,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**93,408,000**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	18,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	73,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75,408,000	

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah**	**98%**	**12,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah**	**98%**	**12,000,000**	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98%	12,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	12,000,000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**570,287,100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**439,995,100**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**296,387,100**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**169,995,100**	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100%	286,392,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	160,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan	9,995,100	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	9,995,100	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**273,900,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**270,000,000**	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	273,900,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	270,000,000	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

2.3.3.8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah "*meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan

pemerintahan desa/kelurahan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjunganom

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**
Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,8
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial& Sarana prasarana	94,50
	Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;

13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

3.3.3. Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Tanjunganom
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Tanjunganom

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4,349,941,300**					**4,532,036,527**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,148,351,700**					**4,244,236,527**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,873,013,000**					**3,938,013,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	35 Orang/bulan	12 Bulan	3,873,013,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	3,873,013,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	5 Dokumen	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	65,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**18,504,000**					**30,800,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Prosentase Tingkat Kebugaran dan Kesehatan ASN		100 % 12 Bulan	1 Paket	100 %	13,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	26,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Tingkat Kebugaran dan Kesehatan ASN		100 % 12 Bulan	35 Orang	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	4,800,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**65,222,100**					**60,435,350**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	3,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	2,429,100

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	30,352,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	30,271,250
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	9,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	6,915,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 12 Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 % 12 Bulan	2 Laporan	12 Bulan	20,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	19,020,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,764,600**					**55,471,827**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah penyediaan mebeleur, peralatan dan mesin		100 % 12 Bulan	3 Unit	3 Jenis	1,599,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	8,845,950
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah penyediaan mebeleur, peralatan dan mesin		100 % 12 Bulan	4 Unit	3 Jenis	29,165,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	46,625,877
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**112,008,000**					**112,788,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		100 % 12 Bulan	1 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	1,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		100 % 12 Bulan	2 Laporan	100 %	27,440,000			Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	27,440,000

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		100 % 12 Bulan	2 Laporan	100 %	83,568,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	84,348,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**48,840,000**					**46,728,350**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		12 Bulan	3 Unit	98 %	32,525,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	31,884,250
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		12 Bulan	5 Unit	98 %	6,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	5,800,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		12 Bulan	2 Unit	98 %	10,214,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	9,044,100
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**151,222,500**					**244,800,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**0**					**88,800,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		12 Bulan	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan	12 Bulan	88,800,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**2,300,000**					**3,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		12 Bulan	1 Laporan	98 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan	12 Bulan	3,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**148,922,500**					**153,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		12 Bulan	1 Laporan	98 %	148,922,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pubik yang dilaksanakan	12 Bulan	153,000,000

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**27,517,100**						**25,564,100**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**27,517,100**						**25,564,100**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah kegiatan kelembagaan perempuan yang dilaksanakan		12 Bulan	98 %	98 %	14,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Bulan	11,975,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan kelembagaan perempuan yang dilaksanakan		12 Bulan	3 Dokumen	98 %	13,067,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Bulan	13,589,100
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,100,000**						**5,725,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**6,100,000**						**5,725,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Forkopimcam terkait trantibum		12 Bulan	3 Laporan	12 Bulan	6,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	12 Bulan	5,725,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**10,350,000**						**6,272,500**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**10,350,000**						**6,272,500**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	umlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional		12 Bulan	98 %	12 Bulan	10,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	12 Bulan	6,272,500
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**6,400,000**						**5,438,400**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**6,400,000**						**5,438,400**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan pembinaan Lembaga Kelurahan		12 Bulan	28 Dokumen	12 Bulan	4,100,000			Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Bulan	3,500,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan Lembaga Kelurahan		12 Bulan	28 Dokumen	12 Bulan	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Bulan	1,938,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Tanjunganom
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0002 Kelurahan Tanjunganom

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**449,525,400**					**551,283,600**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**254,371,000**					**198,318,000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**31,500,000**					**31,500,000**
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	5 Dokumen	12 Bulan	31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	31,500,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,180,000**					**5,698,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Kegaiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	5,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	5,698,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**70,434,500**					**70,442,900**
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersediaanya Kebutuhan Adminitrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	8,940,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	8,402,900
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersediaanya Kebutuhan Adminitrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	3,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersediaanya Kebutuhan Adminitrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	1,800,000			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	1,800,000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediaanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	8 Laporan	12 Bulan	56,694,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	57,240,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**51,000,000**					**0**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	2 Unit	100 %	51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,778,000**					**84,050,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	2 Laporan	12 Bulan	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	450,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	2 Laporan	12 Bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	10,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	2 Laporan	12 Bulan	77,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	73,100,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,478,500**					**6,627,100**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	2 Unit	98 %	1,223,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	1,311,100
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan	2 Unit	98 %	5,255,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	5,316,000

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**195,154,400**					**352,965,600**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**29,964,000**					**218,160,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	3 Unit	98 %	29,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Bulan	218,160,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**165,190,400**					**134,805,600**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Tanjunganom	12 Bulan	98 %	100 %	165,190,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Bulan	134,805,600
												TOTAL	**449,525,400**					**551,283,600**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Tanjunganom
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0014 Kelurahan Warujayeng

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**690,956,900**					**732,155,800**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**250,961,800**					**161,868,700**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**35,280,000**					**35,500,000**
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan	5 Dokumen	12 Bulan	35,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	35,500,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,852,000**					**5,698,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	6,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	5,698,000

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**30,921,800**						**22,870,700**
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Warujayeng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	100 %	1 Paket	90 %	26,269,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Warujayeng	100 %	20,870,700
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Warujayeng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	100 %	1 Paket	90 %	4,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Warujayeng	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**72,500,000**						**0**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan	3 Unit	100 %	72,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**93,408,000**						**85,800,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan 100 %	1 Laporan	12 Bulan	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan	12 Bulan 100 %	12,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan 100 %	1 Laporan	12 Bulan	75,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan	12 Bulan 100 %	73,800,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**12,000,000**						**12,000,000**
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan	3 Unit	98 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	12 Bulan	12,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**439,995,100**						**570,287,100**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**169,995,100**						**296,387,100**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Buan	3 Unit	100 %	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Buan	286,392,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Buan	4 Pokmas / Ormas	100 %	9,995,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Buan	9,995,100
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**270,000,000**						**273,900,000**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Hasil survei kepuasan masyarakat	Hasil SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Warujayeng	12 Bulan	100 %	100 %	270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Bulan	273,900,000
												TOTAL	**690,956,900**						**732,155,800**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Unsur Kewilayahan

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).	5,592,422,050

Tabel 4.2
Sasaran Kecamatan Tanjunganom

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)	
				Program	Pagu Indikatif
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,516,530,950
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial& Sarana prasarana	94,50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	98,000,000
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,250,000
				Program Penyelenggaraan Urusan	6,272,500

				Pemerintahan Umum	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,501,800
3		Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	100 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	948,866,800

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI